



Jamkrida Jateng

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. JAMKRIDA JATENG
TAHUN 2021**

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No.	Nama	Jabatan	Tanggal lulus dan Nomor <i>Fit & Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1.	M. Nazir Siregar	Direktur Utama	No : KEP-132/NB.I/2015 Tanggal 3-2-2015	25 Mei 2019 (5 tahun)	Indonesia	Cluster Agathis Block C1 No. 18 RT/RW 004/013 Pamulang, Tangerang Selatan
2.	Adi Nugroho	Direktur	No : KEP-133/NB.I/2015 Tanggal 3-2-2015	25 Mei 2019 (5 tahun)	Indonesia	Perumahan Taman Kradenan Asri D-23, RT.002/ RW.011, Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati
3.	Sujarwanto Dwiatmoko	Komisaris Utama	No : KEP-134/NB.I/2015 Tanggal 3-2-2015	6 Desember 2018 (4 tahun)	Indonesia	Jl. Candi Kalasan Selatan IV/ No.1028
4.	Herman Budianto	Komisaris Independen	No : Kep-809/NB.11/2019 Tanggal 27-12-2019	24 Januari 2020 (4 tahun)	Indonesia	Bluru Permai EA-4 RT 004/ RW 010 Kel. Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kota Sidoarjo

Data perizinan bagi Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing

No.	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
-	-	-	-	-	-	-

Biodata Singkat Direksi

M. Nazir Siregar (Direktur Utama)

Pendidikan Terakhir

S2 - Magister Manajemen di Bina Nusantara Jakarta

Pengalaman Kerja 5 Tahun terakhir

2015 - Sekarang Direktur Utama PT. Jamkrida Jateng

Adi Nugroho (Direktur)

Pendidikan terakhir

S2 Magister Manajemen di STIE Mitra Indonesia Yogyakarta

Pengalaman Kerja 5 Tahun terakhir

2015 - Sekarang Direktur PT. Jamkrida Jateng

Biodata Singkat Dewan Komisaris

Sujarwanto Dwiatmoko

Pendidikan terakhir

S2 Magister Administrasi Publik UGM

S3 Program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro

Pengalaman Kerja 5 Tahun terakhir

2017 - 2019 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemprov Jawa Tengah

2020 - 2020 Pejabat Sementara Bupati Klaten

2019 - sekarang Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

2019 - sekarang Komisaris Utama PT. Jamkrida Jateng

Herman Budiarto

Pendidikan terakhir

S2 Manajemen di STIE Mahardika Surabaya

Pengalaman Kerja 5 Tahun terakhir

2016 - 2019 Direktur Utama PT. BPRS UMMU, Bangil

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
-	-	-	-	-

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Direksi

- Bertanggung jawab penuh melaksanakan tugas untuk kepentingan Perusahaan dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan
- Mewakili Perusahaan di dalam Perusahaan maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian, dan mengikat Perusahaan dengan pihak lain, serta melakukan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2014, Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2014 dan dalam Anggaran Dasar
- Untuk hal-hal tertentu berhak untuk mengangkat satu orang atau lebih sebagai wakil atau kuasa dengan memberikan surat kuasa
- Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan berdasarkan ketentuan;
- Menetapkan tata tertib Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membuka kantor cabang berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan;
- Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan;
- Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama Perusahaan.

Dewan Komisaris

- Mengawasi kepengurusan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi
- Berhak untuk memasuki bangunan atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, dokumen-dokumen dan memeriksa dan mencocokkan keadaan kas dan bukti-bukti lain serta berhak atas informasi mengenai segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
- Dapat setiap waktu memberhentikan sementara seseorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Sujarwanto Dwiatmoko	Komisaris Utama	Ketua	KPRI Bhakti Praja	Koperasi
			Kepala	Dinas ESDM Prov. Jateng	Pemerintahan
2	Herman Budianto	Komisaris Independen	-	-	-

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

a. Direksi

No	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	M. Nazir Siregar	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Profil Risiko Perusahaan Asuransi yang Baik dan Benar Diklat tata kelola perusahaan dikarenakan perkembangan pandemic covid-19 di Jateng terjadi meningkat Against Fraud and Corruption in Insurance Industry thru Governance - Risk Management - Compliance Governance Fundamentals (with CGP Certification) 	<p>23 April 2021</p> <p>19 Juni 2021</p> <p>29 Juli 2021</p> <p>30 - 31 Agustus 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diselenggarakan secara online oleh Itikad Academy Diselenggarakan secara online oleh Forum BPR BKK Jateng Diselenggarakan secara online oleh Itikad Academy Diselenggarakan secara online oleh CRMS
2.	Adi Nugroho	<ul style="list-style-type: none"> Ujian Sertifikasi BSMR Level 5 Diklat tata kelola perusahaan dikarenakan perkembangan pandemic covid-19 di Jateng terjadi meningkat Pelatihan korporatisasi transformasi perusahaan perorangan, keluarga atau bumd menjadi korporasi sistem manajemen modern dengan cost of capital 2-3% pertahun Webinar Board Roles, Director's Duties And Liabilities 	<p>8 Januari 2021</p> <p>19 Juni 2021</p> <p>18 Juli 2021</p> <p>12 Agustus 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diselenggarakan secara online oleh BSMR Diselenggarakan secara online oleh Forum BPR BKK Jateng Diselenggarakan secara online oleh SNF Consulting Diselenggarakan secara online oleh PPM Management

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Sujarwanto Dwiatmoko	<ul style="list-style-type: none"> Diklat tata kelola perusahaan dikarenakan perkembangan pandemic covid-19 di Jateng terjadi meningkat Master Class Corporate Governance With CCGO And CGOP Certification Insurance Accounting for Non Accountant 	<p>19 Juni 2021</p> <p>13 - 14 Agustus 2021</p> <p>20 November 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diselenggarakan secara online oleh Forum BPR BKK Jateng Diselenggarakan secara online oleh CRMS Diselenggarakan secara online oleh Itikad Academy
2.	Herman Budianto	<ul style="list-style-type: none"> Webinar Pandemi Covid 19 dari Perspektif Aktuarial Diklat tata kelola perusahaan dikarenakan perkembangan pandemic covid-19 di Jateng terjadi meningkat Master Class Compliance Governance With CCGO And CGOP Certification 	<p>29 April 2021</p> <p>19 Juni 2021</p> <p>1 - 4 November 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diselenggarakan secara online oleh Itikad Academy Diselenggarakan secara online oleh Forum BPR BKK Jateng Diselenggarakan secara online oleh CRMS

c. DPS

No	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
-	-	-	-	-

5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

Selama tahun 2021 telah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan, memberi nasihat kepada direksi untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam pelaksanaan tersebut difokuskan pada rapat yang telah diagendakan sebelumnya. Secara umum di dalam rapat tersebut Dewan Komisaris mendapatkan presentasi dan penjelasan dari Direksi mengenai aktifitas perusahaan sampai dengan rapat tersebut dilangsungkan. Direksi memaparkan laporan keuangan sementara, pencapaian perusahaan maupun rencana bisnis yang akan dilakukan selanjutnya.

Atas pemaparan dari Direksi di atas, Dewan Komisaris memberikan masukan, pandangan serta persetujuannya.

6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

Melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya meliputi :

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan pengurusan Perusahaan
2. Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap Rencana Kerja Perusahaan
3. Melaporkan kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan
4. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi dan menandatangani laporan tahunan
5. Bersama Komisaris Utama memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku
6. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance*
7. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
8. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan
9. Memastikan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Penjaminan
10. Mengarahkan tumbuhnya budaya dan kepedulian Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Anti Fraud di seluruh jajaran Perusahaan
11. Memantau Tingkat Kesehatan Perusahaan, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

a. Rapat Direksi

Rapat Direksi dilakukan 12 (dua belas) kali selama tahun 2021

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	M. NAZIR SIREGAR	12	0	100%
2.	ADI NUGROHO	12	0	100%

b. Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Tata Kelola Perusahaan dan Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2014 Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan Rapat. Sampai dengan 31 Desember 2021 telah dilaksanakan 7 (tujuh) kali rapat antara dewan komisaris dengan direksi.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	SUJARWANTO DWIATMOKO	3	4	100 %
2.	HERMAN BUDIANTO	3	4	100 %
3.	M. NAZIR SIREGAR	3	4	100 %
4.	ADI NUGROHO	3	4	100 %

c. Rapat DPS

Sampai dengan 31 Desember 2021 Perusahaan belum memiliki Unit Usaha Syariah

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:

- 1) Komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
- 2) fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas:

1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Komite Audit berada dibawah dewan komisaris dan diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit membantu dewan komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pengendalian internal. Komite audit memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi.

2. Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam :

1. Memastikan pengendalian internal dilaksanakan dengan baik
2. Memastikan pelaksanaan Audit Internal maupun Audit Independen sesuai dengan standar auditing yang berlaku
3. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Auditor Independen dan OJK
4. Memastikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku
5. Tugas dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Komite Audit sesuai ketentuan yang berlaku

3. Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Komite/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Lisa Novita Sari	6 (enam)	100%

4. Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya

Melakukan Review, menganalisa Laporan Internal Audit dan On The Spot atas hal-hal yang masih diperlukan keyakinan lebih lanjut meliputi :

- Analisa dan review Laporan Keuangan serta bagian Finance Accounting & Investment yang terkait dengan proses Keuangan dan Investasi
- Evaluasi terhadap Manual Mutu
- Pengawasan terhadap pelaksanaan dan hasil kerja Divisi & Compliance
- Review pelaksanaan dan hasil pencapaian Customer Relation, Customer Maintenance, Number Of Account & Asset Under Management
- Pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan proses Divisi Manajemen Risiko

5. Struktur komite lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2021 Perusahaan belum memiliki struktur komite lainnya yang membantu Dewan Komisaris

6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2021 Perusahaan belum memiliki program kerja komite lainnya yang membantu Dewan Komisaris

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

1. Fungsi kepatuhan

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Adanya direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota direksi yang bersangkutan.

b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Perusahaan telah mengangkat petugas fungsi kepatuhan sejak tahun 2015, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Direktur Utama membawahi pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan juga bertugas untuk monitoring ketentuan-ketentuan Perusahaan terkait kebijakan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku.

d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

1. Total Gearing Ratio (Maksimum 40 kali)	31.9 kali
2. Current Ratio Minimal 120%	262 %
3. Return On Assets	5.70%
4. BOPO	64.5%
5. Hasil penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>)	Sangat Baik

- e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1.	Kepala Bagian Operasional & IT	Operasional & IT

2. Fungsi auditor internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

a. Ruang lingkup pekerjaan audit

PT. Jamkrida Jateng telah memiliki fungsi Internal Audit yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Internal Audit merupakan Fungsi yang independen dan tidak memiliki kendali langsung terhadap unit bisnis atau kegiatan operasional yang menjadi obyek pemeriksaan. Fungsi Internal Audit akan terus berkoordinasi secara berkesinambungan dengan masing-masing unit bisnis yang berperan aktif dalam melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut temuan audit dan penyelesaiannya secara tepat waktu.

b. Struktur dan kedudukan satuan kerja audit internal

Internal Audit berada langsung di bawah Direktur Utama.

c. Independensi auditor internal

Internal Audit di PT. Jamkrida Jateng merupakan fungsi yang independen karena berada langsung di bawah Direktur Utama.

d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di semua fungsi kerja PT. Jamkrida Jateng diantaranya :

1. Divisi Customer Relation
2. Departement IT & Pelayanan
3. Departemen Penjaminan Risiko
4. Divi Finance, Accounting & Investasi
5. Unit HRD & GA
6. Unit Legal & Compliance

e. Profil kepala satuan kerja audit internal

Fandy Alvian

Pendidikan Terakhir

S2 Magister Akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang.

Pengalaman Kerja

Admin Supervisor at PT Handal Duta Kinarya (2013-2014)

Junior Auditor KAP RMR & Rekan / Accounting & Tax Consultant Widjojo Kusumo, BKP, CPA (2015-2017)

f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

Sampai dengan 31 Desember 2021 Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal adalah 1 (satu)

g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Laporan hasil pelaksanaan tugas internal audit dibuat sebulan sekali, sama seperti periode pemeriksaan internal audit. Laporan Internal Audit berisi temuan dan rekomendasi perbaikan kinerja pada masing-masing fungsi serta tanggapan dari masing-masing fungsi terkait rekomendasi tersebut. Laporan Internal Audit disampaikan langsung oleh internal audit kepada direktur utama

3. Fungsi auditor eksternal

Fungsi auditor eksternal adalah memberikan kredibilitas atas laporan keuangan dan mengurangi risiko informasi bahwa laporan keuangan adalah bias, menyesatkan, tidak akurat, tidak lengkap, dan mengandung kesalahan material.

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2017	KAP ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY	J. ANWAR HASAN, CPA. (AP.0091)	Rp.40.000.000,-
2018	KAP RICHARD RISAMBESSY DAN REKAN	SALMON SIHOMBING (AP.0287)	Rp. 70.000.000,-
2019	KAP HERU SATRIA RUKMANA	HERU SATRIA RUKMANA (AP.1520)	Rp. 70.000.000,-
2020	KAP HERU SATRIA RUKMANA	HERU SATRIA RUKMANA (AP.1520)	Rp. 70.000.000,-
2021	KAP SURATMAN	SURATMAN (AP.1323)	Rp. 60.000.000,-

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Mengawasi dan memberikan nasihat manajemen terhadap strategi risiko perusahaan secara keseluruhan yaitu *risk appetite*, profil risiko, preferensi risiko, toleransi risiko, batasan dan mitigasi.

Direksi Memastikan bahwa sistem manajemen risiko melakukan identifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan risiko perusahaan. Sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawabnya, Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan strategi dan kebijakan di bidang manajemen risiko dan pengendalian internal serta memastikan kecukupan dan keberlanjutan dari waktu ke waktu dalam hal kelengkapan, fungsi dan efektivitas.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan memastikan Perusahaan patuh pada persyaratan peraturan yang berlaku dalam kerangka regulasi nasional. Kebijakan mendefinisikan secara khusus hal-hal sebagai berikut :

- Kategori risiko dimana Perusahaan berada dalam lingkup risiko tersebut
- Metode untuk mengukur dan menilai risiko-risiko tersebut
- Proses dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan mitigasi risiko yang efektif dan manajemennya
- Sistem tata kelola yang dipakai, termasuk tugas dan tanggung jawab dan persyaratan pelaporan internal dan eksternal

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan proses persyaratan minimum untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola dan memantau risiko saat ini dan risiko yang akan datang (*forward looking*) yang bisa timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan.

Kebijakan Manajemen Risiko memastikan manajemen risiko yang baik dan efektif, konsisten dengan 'selera risiko' (*risk appetite*) yang didefinisikan oleh Direksi

4. Struktur organisasi sistem informasi

Dalam struktur organisasi sistem informasi masuk ke dalam fungsi Operasional & IT

5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Teknologi informasi yang digunakan di perusahaan adalah Aplikasi App-Line dan CMS. Untuk pengendalian internalnya adalah pada fungsi-fungsi tertentu hanya dapat melakukan akses fitur-fitur yang berhubungan dengan fungsi tersebut, satu fungsi tidak bisa mengakses fitur dari fungsi lainnya.

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Kerangka manajemen risiko didasarkan pada empat langkah proses:

- Identifikasi risiko yang didisain untuk memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi oleh bisnis sudah dipertimbangkan dengan baik, *economic capital model* merefleksikan *profile* risiko perusahaan, risiko material dan dapat dikuantifikasi sudah diperhitungkan secara benar
- Pengukuran risiko, metode umum yang digunakan (kualitatif maupun kuantitatif) diaplikasikan untuk menyediakan penilaian risiko yang terintegrasi
- Manajemen Risiko dan kontrol, Perusahaan memastikan kontrol yang ketat dan manajemen yang ketat untuk memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan konsisten dengan tingkat yang diinginkan
- Pemantauan risiko

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

Remunerasi yang diberikan Perusahaan kepada Direksi terdiri dari :

- Gaji Bulanan
- Tunjangan Hari Raya
- Insentif Pertengahan Tahun
- Insentif Akhir Tahun
- Tantiem

Sedangkan kepada Dewan Komisaris Perusahaan memberikan remunerasi sebagai berikut :

- Upah bulanan
- Tunjangan Hari Raya
- Insentif Pertengahan Tahun
- Insentif Akhir Tahun
- Tantiem

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Direksi terdiri dari :

- Rumah Dinas bagi direksi yang berasal dari luar wilayah kerja
- Supir/*Driver*
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Asuransi Jiwa
- Asuransi Kesehatan dari Perusahaan Asuransi
- Penggantian biaya transportasi
- Penggantian biaya komunikasi
- Cuti tahunan dan cuti masa kerja
- DPLK
- Mobil Dinas

Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Dewan Komisaris terdiri dari :

- Asuransi Jiwa
- Asuransi Kesehatan dari Perusahaan Asuransi
- Tunjangan transportasi
- Rumah Dinas bagi komisaris yang berasal dari luar wilayah kerja
- BPJS Ketenagakerjaan
- DPLK
- Mobil Dinas

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup jumlah Direksi, jumlah Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a

Jumlah yang diterima dalam satu tahun		Remunerasi*)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	Jumlah Direksi	2 (dua)	2 (dua)
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 1.593.865.667,-	Rp. 172.149.492,-
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	2 (dua)	2 (dua)
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 593.121.318,-	Rp. 127.125.258,-
DPS	Jumlah DPS	-	-
	Nominal (Jutaan Rupiah)	-	-

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

***) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	2 (dua)		
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)		2 (dua)	
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah			

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut :

- | | |
|---|------|
| 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah | 5.75 |
| 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah | 1.25 |
| 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah | 1.25 |
| 4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi | 1.91 |

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth.,
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jl. Setiabudi No. 128
Semarang

Laporan atas Laporan Keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar kami.

Jl. Bukit Anyelir Raya No. 197, Perumnas Bukit Sendangmulyo, Semarang 50272
Phone : 024-76737384, 027-76742628 HP: 081228511988 Email : kapsuratmansmg@gmail.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Dear.,
The Shareholders, Commissioner and Director
PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah
128 Setiabudi Street
Semarang

Report on Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the financial

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standard's on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error in making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.¹² An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin LAPORAN KEUANGAN PER DESEMBER 2021

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

Opini wajar

Menurut pendapat kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KAP SURATMAN

Semarang, 14 Februari 2022
Nomor : 0009/2.1109/AU.01/09/1323-1/1/II/2022



SURATMAN, SE., MM., CPA

Pimpinan

Independent Auditor's Report (Continued)

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah as of December 31, 2021, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Jl. Bukit Anyelir Raya No. 197, Perumnas Bukit Sendangmulyo, Semarang 50272
Phone : 024-76737384, 027-76742628 HP: 081228511988 Email : kapsuratmansmg@gmail.com

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN / STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
TANGGAL 31 DESEMBER 2021/ AS OF DECEMBER 31, 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain / Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
ASET			ASSETS
Aset Lancar			CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	22.076.256.049	58.523.442.104	Cash and Cash Equivalents
Investasi			Investment
Deposito Berjangka - neto	97.967.750.000	104.573.700.000	Time Deposits - net
Efek - Tersedia Untuk Dijual	30.948.560.000	34.041.580.000	Marketable Securities - available for sale
Piutang Co-guarantee/ Reasuransi / Penjaminan Ulang - neto	48.387.565.581	18.300.076.465	Receivables Co-guarantee/ Reinsurance Guarantee - net
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	5.643.535.906	1.476.138.854	Accrued Revenues
Biaya Dibayar Dimuka	48.411.407.588	27.142.715.748	Prepaid Expenses
Pajak Dibayar Dimuka	-	-	Prepaid Taxes
Aset Lancar lain-lain	5.835.526.944	939.048.826	Other Current Assets
Jumlah Aset Lancar	259.270.602.068	244.996.701.997	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar			NON CURRENT ASSETS
Biaya Dibayar Dimuka	102.586.430.337	77.879.595.122	Prepaid Expenses
Aset tetap (Neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 4.951.065.520,- dan Rp 3.466.690.867,-).	1.137.317.727	2.536.776.680	Fixed Assets (Net of accumulated depreciation as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 4.951.065.520,- and Rp 2.330.574.162 respectively).
Aset Sewa Guna Usaha	1.193.671.354	1.406.252.604	Capital leased assets
Aset tidak berwujud - bersih	2.459.715.724	3.529.831.660	Intangible assets - Netto
Piutang dalam rangka restrukturisasi penjaminan	-	-	Receivables in a restructuring guarantee
Aset pajak tangguhan - bersih	652.971.902	1.579.731.799	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	108.030.107.044	86.932.187.865	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET	367.300.709.112	331.928.889.862	TOTAL ASSETS

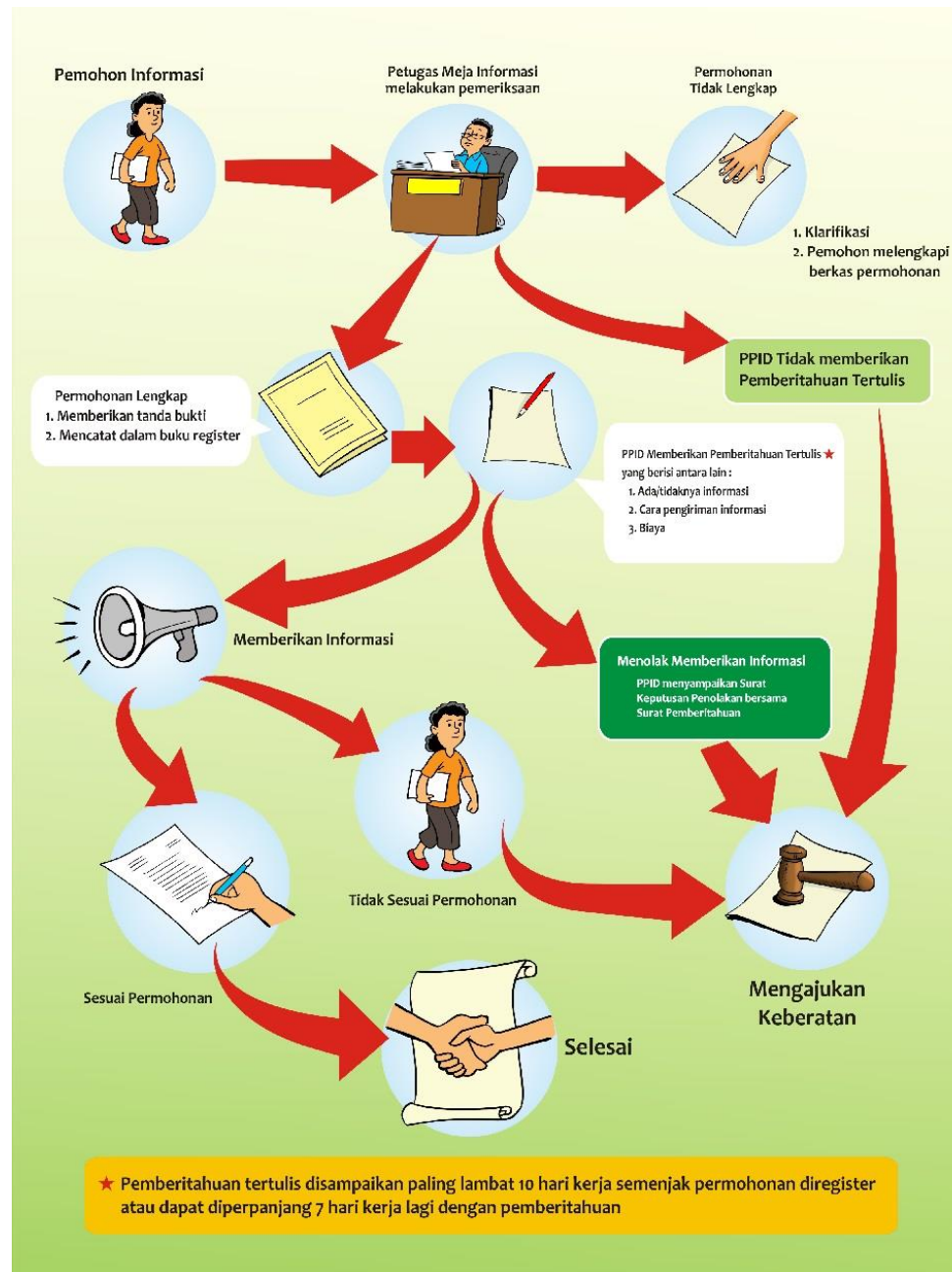
PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN / STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
TANGGAL 31 DESEMBER 2021/ AS OF DECEMBER 31, 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain / Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS LANCAR			CURRENT LIABILITIES
Utang Klaim	526.289.192	837.226.449	Claims Payable
UP yang Ditangguhkan	57.423.808.496	45.890.171.648	Deferred IJP
Utang Pajak	1.722.521.250	1.972.004.366	Tax Payable
Utang Premi Reasuransi	14.133.580.666	14.863.549.274	Reinsurance Premium Liabilities
Utang Akuisisi	3.084.433.603	1.598.922.087	Acquisition Payable
Utang IJP Co-guarantee / Penjaminan Ulang	24.494.347	37.890.896	IJP Co-guarantee / Reinsurance Payable
Utang Sewa Guna	323.501.848	1.253.830.650	Capital Lease
Cadangan Klaim	7.262.087.484	8.275.240.817	Claims Reserves
Liabilitas Lancar Lain - Lain	2.699.139.022	1.262.644.407	Other Current Liabilities
Jumlah Liabilitas Lancar	87.199.855.908	75.991.480.593	Total Current Assets
LIABILITAS TIDAK LANCAR			NON CURRENT LIABILITIES
UP yang Ditangguhkan	95.895.558.716	83.785.041.195	Deferred IJP
Utang Sewa Guna	8.344.930	340.302.480	Capital Lease
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.331.298.407	2.139.622.466	Post-employment Benefits Liabilities
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	98.235.202.053	86.264.966.141	Total Non of Current Assets
JUMLAH LIABILITAS	185.435.057.961	162.256.446.734	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - nilai nominal			Share capital - par value
Modal Dasar Rp 200.000.000.000 terdiri dari 20.000 saham nominal Rp 10.000.000 per lembar saham, ditempatkan dan disetor 15.495 saham tahun 2021 dan 14.695 pada tahun 2020	150.950.000.000	146.950.000.000	Authorized Capital amounted to Rp 200.000.000.000 of 20.000 shares with Rp 10.000.000.000 par value per share, had been issued and paid 15.495 in 2020 and 14.695 in 2020.
Tambahan Setoran Modal	4.000.000.000	-	Additional paid-up capital
Cadangan			Reserves
Cadangan Umum	11.544.848.270	8.093.795.982	General Reserves
Cadangan Tujuan	41.144.424	6.166.433	Backup destination
Laba Tahun Berjalan	16.142.982.464	13.804.209.150	Profit (Loss) Current Year
Laba (Rugi) Komprehensif Lainnya	(813.324.006)	818.271.563	Other Comprehensive Income(Loss)
JUMLAH EKUITAS	181.865.651.151	169.672.443.128	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	367.300.709.112	331.928.889.862	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2021 /
For The Year Ended December 31, 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain / *Expressed in Rupiah, unless otherwise stated*)

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan			Underwriting Fee Income
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	96.229.136.584	66.083.825.981	Gross Underwriting Fee
IJP Co-guaranteee/ IJPU/ Premi Reasuransi	(31.414.870.816)	(15.414.236.945)	IJP Co-Guaranteee/IJPU/Reinsurance Premiums
Beban Akuisisi Penjaminan	(19.114.957.727)	(9.688.298.636)	Underwriting Acquisition (Income) Expenses
JUMLAH PENDAPATAN IJP - BERSIH	45.699.308.041	40.981.290.400	TOTAL IJP REVENUES - NET
Beban Klaim			Claim Expenses
Beban Klaim Bruto	91.905.482.205	41.675.332.953	Gross Claims Expenses
Klaim Co-guaranteee/Penjaminan Ulang/Reasuransi	(62.411.356.516)	(23.679.571.289)	Co Guarantee Claims
Kenaikan/Penurunan Cadangan Klaim	(1.013.153.333)	1.203.875.992	Increase/(Decrease) in Claims Reserves
Beban Klaim Lainnya	-	412.374.411	Other Claim Expenses
Subrogasi	(8.301.206.579)	(2.107.631.289)	Subrogation
Jumlah Beban Klaim	20.179.765.777	17.504.380.778	Total Claim Expenses
Pendapatan Penjaminan Bersih	25.519.542.264	23.476.909.622	Net Underwriting Income
Pendapatan Operasional Lainnya			Other Operating Income
Pendapatan Bunga	7.854.700.772	9.771.712.440	Interest Income
Pendapatan Investasi Selain Bunga	2.882.711.306	2.549.708.333	Investment Income Other Than Interest
Pendapatan Operasional Lain - Lain	1.797.984.750	808.613.968	Other Operating Income
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	12.535.396.828	13.130.034.741	Total Operating Income
Beban Operasional Lainnya			Operating Expenses
Beban Gaji dan Tunjangan	6.494.065.679	5.630.858.817	Salaries and Allowances
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.922.700.474	2.637.401.665	Depreciation and Amortization
Beban Administrasi dan Umum	8.081.962.403	7.787.776.363	General and Administrative Expenses
Beban Operasional Lainnya	-	-	Other Operating Expenses
Jumlah Beban Operasional Lainnya	17.498.728.556	16.056.036.845	Total Operating Expenses
Laba Operasional	20.556.210.536	20.550.907.518	Operating Income
Pendapatan (Beban) Non Operasional			Non Operating Income and Expenses
Pendapatan Non Operasional	765.550.000	(1.056.300.000)	Non Operating Income
Beban Non Operasional	(401.426.633)	(1.443.574.281)	Non Operating Expenses
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Neto	364.123.367	(2.499.874.281)	Total Non Operating Income (Expenses) - Net
Laba Sebelum Pajak	20.920.333.903	18.051.033.237	Income before taxes
Taksiran Pajak Penghasilan			Estimated Corporate Income Tax
Pajak kini			Current Tax
Pajak Final	1.908.624.142	2.219.244.676	Final Income tax
Pajak Non Final	2.715.222.400	3.023.291.750	Non final Income tax
Pajak Tangguhan	153.504.897	(995.712.339)	Deferred tax
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	4.777.351.439	4.246.824.087	Total income taxes
Laba Bersih	16.142.982.464	13.804.209.150	Net income
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke Laba Rugi			Items that will not be reclassified to profit/loss
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasca kerja-neto	(316.154.418)	(316.154.418)	Gain (loss) actuarial program post employment benefit
Pos yang akan direklasifikasikan ke Laba Rugi			Items that will be reclassified to profit/loss
Bunga obligasi belum terealisasi-neto	1.203.655.000	1.976.910.000	Unrealized bond interest-net
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	17.030.483.046	15.464.964.732	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME





PT Jamkrida Jateng adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan salah satunya adalah Penjaminan atas pengadaan barang dan jasa (*Surety Bond*).

Surety Bond memberikan jaminan kepada Pemilik Proyek / *obligee* terhadap kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban Pelaksana Proyek/Principal atas suatu proyek (konstruksi/non konstruksi) dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Jenis *Surety Bond* yang dilayani antara lain :

1. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)
2. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)
3. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)
4. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)



Alur Proses Penjaminan Surety Bond



Kegiatan Usaha

- Penjaminan Kredit
- Penjaminan atas Pengadaan Barang & Jasa (*Surety Bond*)
- Penjaminan Kontra Bank Garansi
- Penjaminan Kepabeanaan (*Custom Bond*)



PT Jamkrida Jateng adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan salah satunya adalah Penjaminan atas pengadaan barang dan jasa (*Surety Bond*).

Surety Bond memberikan jaminan kepada Pemilik Proyek / *Obligee* terhadap kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban Pelaksana Proyek/Principal atas suatu proyek (konstruksi/non konstruksi) dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Jenis *Surety Bond* yang dilayani antara lain :

1. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)
2. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)
3. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)
4. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)



Syarat Pengajuan Surety Bond Untuk Database Awal

Company Profile

Laporan Keuangan L/R Terbaru (Min. 2 tahun terakhir)

Pengalaman Kerja (List Min. 2 tahun terakhir)

Surat Permohonan

Bersedia Mengisi SPKMGR

Neraca Keuangan Terbaru (Min. 2 tahun terakhir)

Dasar Dokumen Penjaminan

- (Jaminan Pelaksanaan = SPPBJ)
- (Jaminan Uang Muka = Kontrak)
- (Jaminan Pemeliharaan = PHO)

Kegiatan Usaha

- Penjaminan Kredit
- Penjaminan atas Pengadaan Barang & Jasa (*Surety Bond*)
- Penjaminan Kontra Bank Garansi
- Penjaminan Kepabeanaan (*Customs Bond*)
- L/C (Letter of Credit)

Customs Bond

Merupakan penjaminan yang diberikan kepada Principal/Importir/Produsen Exportir sebagai jaminan yang berkaitan dengan fasilitas penundaan, pembebasan bea masuk dan kewajiban kepabeaan lainnya untuk kepentingan negara. Ditjen Bea Cukai memperoleh jaminan bahwa Eksportir/Importir akan mengekspor kembali produk yang pengadaan bahan bakunya telah mendapat fasilitas kepabeaan maupun fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk dan/atau menyelesaikan kewajibannya untuk membayar bea masuk

JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN yang selanjutnya disebut **JAMINAN** adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeaan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeaan yang diserahkan kepada Kantor Pabeaan.

Jaminan Dalam Rangka Kepabeaan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 259/PMK.04/2010

Bentuk Jaminan Kepabeaan

Jaminan Kepabeaan

1. KITE (Kemudahan Import tujuan Eksport)
2. KABER (Kawasan Berikat)
3. PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeaan)

Jaminan dapat digunakan untuk:
menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeaan:

- atas impor yang diberikan penundaan pembayaran
- atas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan jaminan

Kegiatan Usaha

Penjaminan Kredit

Penjaminan atas Pengadaan Barang & Jasa (Surety Bond)

Penjaminan Kontra Bank Garansi

Penjaminan Kepabeaan (Customs Bond)

L/C (Letter of Credit)

Kegiatan Usaha

Penjaminan Kredit

Penjaminan atas Pengadaan Barang & Jasa (Surety Bond)

Penjaminan Kontra Bank Garansi

Penjaminan Kepabeaan (Custom Bond)

L/C (Letter of Credit)

Alur Proses Penjaminan Kredit

Lembaga Keuangan / Koperasi → Kucuran Kredit → **UMKM / TERJAMIN**

← Bayar Cicilan

← Pembayaran Klaim sesuai dengan kesepakatan

← Penjaminan Kredit sesuai dengan Perjanjian → **Jamkrida Jateng** (Mitra Usaha Masyarakat)

PT Jamkrida Jateng adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjaminan kredit dengan prioritas utama :

1. **membantu UMKM** memperluas permodalan dan memperluas pencapaian kredit yang selama ini terkendala manajemen risiko perbankan
2. **mengurangi dampak risiko financial bagi lembaga keuangan / koperasi** apabila kredit tidak dilunasi akibat dari kredit macet, terjamin meninggal dunia maupun PHK

Nilai Tambah Bagi Mitra Kami

1. Membantu akses pendanaan dari LPOB dan lembaga keuangan lainnya

2. Edukasi & Sosialisasi Kreatif

5. Manajemen yang solid & dukungan Pemda Jateng

3. Menyediakan Aplikasi perbankan Mikro bagi BPR / Koperasi

4. Appline

Certificate ID21/05540

The management system of

PT Jaminan Kredit Daerah Jawa Tengah

Jl. Setia Budi No.128, Srandol Wetan, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah 50263, Indonesia

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities

Credit Guarantee And Non Credit Guarantee Services

This certificate is valid from 3 January 2021 until 3 January 2024 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date. Issue 1. Certified since 3 January 2021

Authorised by

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6966 f +44 (0)151 350-6900 www.sgs.com

HC SGS 9001 2015 0818

Page 1 of 1

SGS



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.html. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Certificate ID22/00000105

The management system of

PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

has been assessed and certified as meeting the requirements of **ISO 37001:2016**

For the following activities
Credit Guarantee And Non Credit Guarantee Services

This certificate is valid from 05 April 2022 until 05 April 2025 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. Issue 1. Certified since 05 April 2022.

Authorised by

PT SGS Indonesia
The Garden Centre 2nd Floor, Cilandak Commercial Estate, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia
t +6221 2970 0600 - www.sgs.com



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.html. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Page 1 / 1



SGS

PT Jamkrida Jateng

Analysts: Handhayu Kusumowinahyu / Kreshna Dwinanta Armand

Phone/Fax/E-mail: (62-21) 50968469 / 50968468 / handhayu.kusumowinahyu@pefindo.co.id / kreshna.armand@pefindo.co.id

CREDIT PROFILE	FINANCIAL HIGHLIGHTS				
	As of/for the year ended	Mar-2021 (Unaudited)	Dec-2020 (Audited)	Dec-2019 (Audited)	Dec-2018 (Audited)
Corporate Rating	BBB/Stable				
Rated Issues					
Rating Period	June 2, 2021 – June 1, 2022				
Rating History					
	Total assets [IDR bn]	360.6	331.9	277.5	227.5
	Total equity [IDR bn]	173.9	169.7	162.5	154.3
	Total investment [IDR bn]	143.1	138.6	131.1	116.9
	Net guarantee fee [IDR bn]	12.9	50.7	40.6	25.1
	Net claims [IDR bn]	3.7	19.2	16.6	8.9
	Underwriting result [IDR bn]	5.8	21.4	18.0	12.9
	Net income after tax [IDR bn]	3.6	13.8	12.4	8.6
	Total comprehensive income [IDR bn]	3.6	15.5	14.0	6.5
	ROAA [%]	4.2	4.5	4.9	4.3
	Loss ratio [%]	28.6	37.9	40.9	35.6
	Net guarantee fee/Equity [x]	0.3	0.3	0.2	0.2
	Retention ratio [%]	73.0	76.7	79.6	81.1
	Equity/Total assets [%]	48.2	51.1	58.6	67.8
	Gearing ratio [x]	20.6	19.6	20.7	21.0
	USD exchange rate [IDR/USD]	14,572	14,105	13,901	14,481

*Annualized
The above ratios have been computed based on information from the company and published accounts. Where applicable, some items have been restated according to PEFINDO's definitions.

Jamkrida Jateng rated "BBB" with stable outlook

PEFINDO has assigned its "BBB" rating to PT Jamkrida Jateng (Jamkrida Jateng). The outlook for the rating is "stable".

A guarantee provider rated "BBB" has adequate financial security characteristics relative to other companies in Indonesia, but is more likely to be affected by adverse business conditions than higher rated guarantee providers.

The rating reflects the Company's important role to the Provincial Government of Central Java (the Parent) and moderate operating performance. The rating is constrained by its below average market position and limited potential for revenue generation.

The rating may be raised if Jamkrida Jateng significantly and sustainably improves its business presence in the credit guarantee industry, accompanied by steady revenue. The rating may be lowered if PEFINDO views a weakening degree of support from the Parent. Rating pressure may also come from a sharp decline in its market position, or if its capitalization or liquidity profile weakens substantially.

We are of the view that the Covid-19 pandemic has moderately impacted the credit guarantee industry's generation of new business resulting from declining new loan disbursements by banks and finance companies. Moreover, claim activities may increase following the economic downturn affecting debtors' repayment capacity, although this is partly mitigated by the relaxation scheme for eligible debtors affected by the Covid-19. We expect the credit guarantee industry to further augment its reserve provision due to the underwriting losses. The prevailing low interest rate and heightening investment market volatility will also weigh on industry players' profitability and slow down capital accumulation over the near term. However, credit guarantee companies typically have a key position in their niche market and manage modest growth in their guarantee volumes. We expect the industry to maintain a sufficient buffer over its regulatory solvency requirements, supported by a re-guarantee scheme. We view the industry's liquidity as adequate with sufficient holdings of liquid assets, remaining supportive of its short-term repayment needs.

We are of the view that the impact of the Covid-19 on Jamkrida Jateng's overall credit profile will remain manageable given the majority of its gross guarantee fee is generated from multi-purpose loans extended to civil servants (PNS), which employment status should remain relatively unchanged during the pandemic. We are of the view that the repayments for the loans are less vulnerable to the pandemic, as the loans entail low risk due to the salary deduction scheme.

Jamkrida Jateng was established in December 2014 to provide credit guarantee services to cooperatives, and micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs), particularly in Central Java province through various guarantee products. It provides credit guarantees for productive and consumer loans, as well as management consultancy assistance. As of March 31, 2021 (1Q2021), its shareholders consisted of the Provincial Government of Central Java (95.27%), KPRI Bhakti Praja (1.36%), Regency Government of Demak (1.36%), Regency Government of Temanggung (0.37%), and Regency Government of Grobogan (1.64%).

Supporting factors for the above rating are:

- Important role to Provincial Government of Central Java.** PEFINDO is of the view that Jamkrida Jateng plays an important role for its Parent, as it was established specifically to support economic development in the region by providing guarantees to feasible but not yet bankable micro, small and medium enterprises (MSMEs), thereby generating more business activities and employment. The provincial government controls Jamkrida Jateng through its 95.27% ownership and is expected to maintain its majority control over the foreseeable future to ensure the Company's role in accomplishing the government's objectives. In recognition of the Company's important role, the Parent regularly injected capital during 2016-2020. Jamkrida Jateng's gearing ratio was adequate at 20.6x as of 1Q2021, while its productive gearing ratio was 4.1x, well below the regulatory maximum of 40.0x and 20.0x, respectively. Jamkrida Jateng also benefits from the potential and sustainable business synergy with its sister companies of

more than 30 BPRs, also owned by the provincial government, both in the consumer and productive loan segments. PEFINDO is of the view that the Parent is capable of supporting Jamkrida Jateng, particularly during financial distress, as indicated by Central Java's good economic potential, mainly from manufacturing industry. Central Java's GRDP per capita was IDR38.82 million in 2020 compare to the national's GDP at IDR57.25 million, which was the fourth highest after DKI Jakarta, East Java and West Java.

- Moderate operating performance.** We project Jamkrida Jateng's operating performance to remain moderate in the near to medium term, supported by a good risk management system and high margin business from BPRs in the region. Although Jamkrida Jateng is strategically positioned to support MSME activities in the region, the management remains committed to maintain acceptable risk appetite, which will contribute to operating performance indicators, as reflected in a combined ratio (loss, expense, and commission ratio) of 90%-95% in the near to medium term. Its combined ratio improved to 84.9% in 1Q2021 from 94.4% in FY2020, in line with the improvement in its loss ratio to 28.6% from 37.9% over the same period. Given its better bargaining position with the BPRs extending PNS loans in the region, Jamkrida Jateng should be able to maintain a profitable business and stable guarantee fee income overall, leading to a stable ROAA at 4-5%.

The rating is constrained by:

- Below average market position.** We project Jamkrida Jateng's market position to remain below average in the medium term, due to the intense competition including against the state-owned guarantee company and general insurance companies, providing similar services, many of which already have a larger capacity, longer experience, established relationships, and proven service quality. Jamkrida Jateng has resorted to seek business from counterparties, such as rural banks, cooperatives, and other institutions typically entailing higher risk profiles. We are of the view that the tight competition may constrain Jamkrida Jateng's efforts to expand its market presence in the industry in the near to medium term, and we project its market share in terms of gross guarantee fee to remain below average at 1%-2% of the total guarantee industry, accounting for only 0.1% combined with the general insurance industry.
- Limited potential for revenue generation.** Jamkrida Jateng's capacity to grow its business highly depends on its equity base, as it is regulated to maintain gearing ratio below 40.0x. To strengthen its capitalization, Jamkrida Jateng depends on the capital injection from its shareholders, which may be limited in the near term as the fund is to be allocated to other industries more severely affected by the pandemic. Its flexibility to improve its fee structure in order to improve its bottom line and retained earnings is also constrained by its special mission of prioritizing the role of being an agent of regional development rather than profitability. Jamkrida Jateng's revenue generation will also remain concentrated in Central Java, and its expansion outside the region may not result in significant outcome to the Company's overall business profile.

DISCLAIMER

The rating contained in this report or publication is the opinion of PT Pemitriang Etik Indonesia (PEFINDO) given based on the rating result on the date the rating was made. The rating is a forward-looking opinion regarding the rated party's capability to meet its financial obligations fully and on time, based on assumptions made at the time of rating. The rating is not a recommendation for investors to make investment decisions (whether the decision is to buy, sell, or hold any debt securities based on or related to the rating or other investment decisions) and/or an opinion on the fairness value of debt securities and/or the value of the entity assigned a rating by PEFINDO. All the data and information needed in the rating process are obtained from the party requesting the rating, which are considered reliable in conveying the accuracy and correctness of the data and information, as well as from other sources deemed reliable. PEFINDO does not conduct audits, due diligence, or independent verifications of every information and data received and used as basis in the rating process. PEFINDO does not take any responsibility for the truth, completeness, timeliness, and accuracy of the information and data referred to. The accuracy and correctness of the information and data are fully the responsibility of the parties providing them. PEFINDO and every of its member of the Board of Directors, Commissioners, Shareholders and Employees are not responsible to any party for losses, costs and expenses suffered or that arise as a result of the use of the contents and/or information in this rating report or publication, either directly or indirectly. PEFINDO generally receives fees for its rating services from parties who request the ratings, and PEFINDO discloses its rating fees prior to the rating assignment. PEFINDO has a commitment in the form of policies and procedures to maintain objectivity, integrity, and independence in the rating process. PEFINDO also has a "Code of Conduct" to avoid conflicts of interest in the rating process. Ratings may change in the future due to events that were not anticipated at the time they were first assigned. PEFINDO has the right to withdraw ratings if the data and information received are determined to be inadequate and/or the rated company does not fulfill its obligations to PEFINDO. For ratings that received approval for publication from the rated party, PEFINDO has the right to publish the ratings and analysis in its reports or publication, and publish the results of the review of the published ratings, both periodically and specifically in case there are material facts or important events that could affect the previous ratings. Reproduction of the contents of this publication, in full or in part, requires written approval from PEFINDO. PEFINDO is not responsible for publications by other parties of contents related to the ratings given by PEFINDO.

Sumber :

<https://jamkrida-jateng.co.id>

<https://www.instagram.com/jamkridajateng/>

<https://www.facebook.com/jamkrida.jawatengah/>

https://twitter.com/Jamkrida_Jateng/

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

1 . Rencana jangka panjang dan rencana kerja

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun

Tujuan Yang Hendak Dicapai Pada Akhir Rencana Jangka Panjang (RJPP) pada akhir Rencana Jangka Panjang (RJPP) sukses yang akan di wujudkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut

Sasaran Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan

1. Perusahaan didukung oleh team manajemen risiko dan kinerja manajemen yang baik, akan menjadi tempat dimana sumber daya yang profesional dan inovasi dapat berkembang.
2. Perusahaan akan lebih besar dari saat 5 (lima) tahun didirikan, hal ini didasarkan pada program yang berkelanjutan, pertumbuhan yang positif, Melampaui kinerja yang telah ditetapkan

Sasaran Perspektif Bisnis Proses

1. Perusahaan akan menjadi market leader dalam bidang penjaminan (Kategori BUMD).
2. Optimalisasi Rantai distribusi Perusahaan tercapai melalui penggunaan teknologi yang efisien.
3. Pengembangan Teknologi Informasi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan brand corporate image

Sasaran Perspektif Customer

1. Perusahaan akan mengakses semua wilayah potensial di Indonesia melalui jaringan mitra distribusi.
2. Dipercaya dalam Pelayanan dan pembayaran klaim berdasarkan norma-norma dalam Industri Penjaminan.
3. Menargetkan kenaikan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) terbesar kedua setelah Perum Jamkrindo

Sasaran Perspektif Financial

1. Memberikan kontribusi pendapatan untuk daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Memberikan keuntungan kepada Nasabah & Mitra distribusi
3. Mensejahterakan karyawan Perusahaan.
4. Aktif dalam *Corporate Social Responsibility*
5. Menciptakan *value creation* yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan

2. Anggaran tahunan

RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN 2022

❖ **RENCANA KEGIATAN USAHA PENJAMINAN**

1. Rencana Penjaminan Produktif

a. Penjaminan Kredit Produktif (**Outstanding Penjaminan Retensi Sendiri**)

No	Lembaga Penyalur	Des 2022
1	Bank	1.348.652.025.863
2	Non Bank	872.657.193.205
3	Lainnya	423.106.517.918
	Total	2.644.415.736.986

b. Penjaminan Kredit Produktif (Jumlah Terjamin)

No	Lembaga Penyalur	Des 2022
1	Bank	143.029
2	Non Bank	39.637
3	Lainnya	1.639
	Total	184.304

c. Penjaminan Kredit Produktif (Imbal Jasa Penjaminan) *Cash Basis*

No	Lembaga Penyalur	Des 2022
1	Bank	27.374.613.953
2	Non Bank	17.712.985.499
3	Lainnya	8.588.114.181
	Total	53.675.713.633

d. Penjaminan lainnya

Jenis Penjaminan	Des 2022
Penjaminan atas surat utang	1.000.000.000
Penjaminan pembelian barang secara angsuran	1.000.000.000
Penjaminan transaksi dagang	1.000.000.000
Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond)	338.485.214.334
Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi)	38.079.586.612
Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri	1.000.000.000
Penjaminan <i>letter of credit</i>	-
Penjaminan kepabeanan (<i>customs bonds</i>)	-
Penjaminan Cukai	-
Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan penjaminan	-
Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari OJK	-
Jumlah Total	380.564.800.946

2. Alasan/Pertimbangan dan Strategi

a. Alasan/Pertimbangan

- Rencana pengembangan bisnis,
- meningkatkan pertumbuhan Imbal Jasa Penjaminan dan Nilai Penjaminan produktif (minimal nilai penjaminan produktif 30% dari total nilai penjaminan),
- Tidak ada waktu yang pasti kapan pandemi Covid 19 akan berakhir, serta restruktur terkait pandemi Covid 19 yang selesai pada Maret 2023, tentunya akan menimbulkan potensi bertambahnya nilai klaim.

b. Strategi

- Melakukan kegiatan kunjungan ke lapangan,
- *Gathering* dengan asosiasi
- Sinergi OPD dan BUMD lain untuk pengembangan kegiatan usaha,
- Melakukan Penjaminan Langsung
- Perlunya sebuah mitigasi yang tepat dalam menghadapi kendala tersebut, seperti halnya penerapan *stop loss* sebagai alternatif lain dari sumber subrogasi.

3. Rencana Penjaminan Nonproduktif

a. Penjaminan Kredit Nonproduktif (Outstanding Penjaminan Retensi sendiri)

No	Lembaga Penyalur	Des 2022
1	Bank	6,144,097,970,273
2	Non Bank	61,771,978,465
3	Lainnya	13,296,443,314
	Total	6,219,166,392,052

b. Tabel Rencana Penjaminan Kredit Nonproduktif (Jumlah Terjamin)

No	Lembaga Penyalur	Des 2022
1	Bank	441,002
2	Non Bank	5,552
3	Lainnya	1,808
	Total	448,363

c. Tabel Rencana Penjaminan Kredit Nonproduktif (Imbal Jasa Penjaminan)

No	Lembaga Penyalur	Des 2022
1	Bank	87,670,332,267
2	Non Bank	31,310,832,952
3	Lainnya	6,262,166,590
	Total	125,243,331,809

4. Alasan/Pertimbangan dan Strategi

a. Alasan/Pertimbangan

- Rencana pengembangan bisnis dan target produksi *customer relation*
- Mempertahankan pertumbuhan IJP
- Meningkatkan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan

b. Strategi

- Maintenance nasabah existing
- Menambah IJP dari kegiatan new business

❖ RENCANA PENGEMBANGAN ATAU PERLUASAN KEGIATAN USAHA

1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penjaminan Baru yang Akan Dipasarkan dan yang Wajib Dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 - a. Tabel Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penjaminan Baru yang Akan Dipasarkan dan yang Wajib Dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

No	Jenis Kegiatan Usaha	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Tujuan Kegiatan Usaha		Plafon Penjaminan	Jumlah Terjamin	IJP	Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan Strategi Bisnis Perusahaan
				Bagi Perusahaan	Bagi Terjamin				
1	Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	Jaminan yang diberikan kepada Bank Pembuka SKBDN untuk kepentingan Applicant / Importir dalam hal terjadi kegagalan pembayaran (<i>default payment</i>) pada saat jatuh tempo SKBDN.	Maret-Desember 2022	Memberikan pendapatan berupa imbal jasa penjaminan Diversifikasi produk atas penjaminan eksisting	Mengurangi kerugian yang dapat ditanggung terjamin	1 Milyar	5	20 Juta	Diversifikasi Kegiatan Usaha, Jangka waktu penjaminan relatif pendek sehingga mempengaruhi gearing ratio & pengakuan pendapatan
2	Penjaminan Pembelian barang secara angsuran	Jaminan yang diberikan kepada Produsen Barang untuk kepentingan pembeli barang dalam hal terjadi kegagalan pembayaran (<i>default payment</i>) pada saat jatuh tempo pembayaran	Maret-Desember 2022	Memberikan pendapatan berupa imbal jasa penjaminan Diversifikasi produk atas penjaminan eksisting	Mengurangi kerugian yang dapat ditanggung terjamin	1 Milyar	5	20 Juta	Diversifikasi Kegiatan Usaha
3	Penjaminan atas surat utang	Jaminan yang diberikan kepada badan hukum/Lembaga/ perorangan untuk kepentingan principal dalam hal terjadi kegagalan pembayaran (<i>default payment</i>) pada saat jatuh tempo pembayaran	Maret-Desember 2022	Memberikan pendapatan berupa imbal jasa penjaminan Diversifikasi produk atas penjaminan eksisting	Mengurangi kerugian yang dapat ditanggung oleh terjamin	1 Milyar	5	20 Juta	Diversifikasi Kegiatan Usaha, Jangka waktu penjaminan relatif pendek sehingga mempengaruhi gearing ratio & pengakuan pendapatan
4	Transaksi Dagang	Jaminan yang diberikan kepada Supplier atau Buyer terhadap transaksi dagang	Maret-Desember 2022	Memberikan pendapatan berupa imbal jasa penjaminan Diversifikasi produk atas penjaminan eksisting	Mengurangi kerugian yang dapat ditanggung oleh terjamin	1 Milyar	5	20 Juta	Diversifikasi Kegiatan Usaha, Jangka waktu penjaminan relatif pendek sehingga mempengaruhi gearing ratio & pengakuan pendapatan

b. Alasan / Pertimbangan

a) Penjaminan SKBDN

- Sebagai diversifikasi produk penjaminan kredit proyek yang selama ini telah dilakukan
- Sebagai alternatif penjaminan yang dapat diberikan baik bagi penerima jaminan dan terjamin
- Sebagai tambahan sumber pendapatan imbal jasa penjaminan atas usaha penjaminan yang sekarang ini telah dilakukan

b) Penjaminan Pembelian Barang secara Angsuran

- Menangkap peluang pasar usaha penjaminan yang belum dilakukan oleh lembaga penjaminan lain
- Rintisan produk penjaminan unggulan yang bersifat massal
- Dapat memberikan tambahan pendapatan imbal jasa pendapatan yang signifikan

c) Penjaminan atas Surat Utang

- Sebagai alternatif model bisnis bagi penerima Jaminan
- Rintisan produk *corporate guarantee*
- Dapat memberikan tambahan pendapatan imbal jasa pendapatan yang signifikan

d) Transaksi dagang

- Memberikan jaminan dari gagal bayar atas utang komersil. memastikan bahwa faktur tagihan akan dibayar dan memungkinkan buyer/supplier untuk mengelola risiko komersial dan politik dalam perdagangan
- Jangka waktu penjaminan relatif pendek
- Meningkatkan Pertumbuhan Imbal Jasa Penjaminan

c. Strategi

a) Melakukan disain produk yang dapat memenuhi permintaan pasar

b) Menentukan target pasar dan segment pasar yang akan dituju

c) Melakukan upaya pemasaran dan sosialisasi produk secara terstruktur, sistematis dan berkelanjutan

2. Rencana Pelaksanaan Perluasan Kegiatan Usaha

a. Tabel Rencana Perluasan Kegiatan Usaha

No	Jenis Kegiatan Usaha	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Tujuan Kegiatan Usaha		Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan Strategi Bisnis Perusahaan
				Bagi Perusahaan	Bagi Mitra	
1	Penjaminan kredit	Penjaminan kredit kerjasama dengan water.org	Januari-desember 2022	Mempeluas ruang lingkup usaha	Tersedianya lembaga penjamin yang dapat memberikan penjaminan kepada SPAM	Sebagai langkah strategis memperluas pasar
2	Penjaminan Kredit	Penjaminan Langsung	Januari-desember 2022	Meningkatkan usaha produktif Meningkatkan IJP	Verifikasi awal dilakukan oleh Penjamin untuk usaha produktif yang <i>feasible</i> namun belum <i>bankable</i> Memberikan penjaminan gagal bayar maksimal sebesar 100% dari plafond pinjaman sehingga memberikan win-win solusi bagi mitra	Meningkatkan Penjaminan Usaha Produktif

a. Alasan / Pertimbangan

- Memperluas calon terjamin yang mempunyai risiko rendah sehingga penjaminan dapat meminimalisasi dari risiko klaim
- Optimalisasi manfaat penjaminan kepada calon terjamin yang belum dapat dijamin oleh lembaga penjaminan daerah lain
- Memberikan daya tarik bagi *stakeholder* lainnya untuk dapat turut berkontribusi secara aktif dalam industri penjaminan

b. Strategi

- Menetapkan *road map* perluasan ruang lingkup usaha yang ingin di capai
- Bersinergi dengan lembaga eksternal yang telah melaksanakan penjaminan kredit di Jawa Tengah agar dapat dilakukan juga di luar Provinsi Jawa Tengah

❖ RENCANA PERMODALAN

1. Proyeksi Permodalan

Keterangan	Des 2022
Pemegang Saham Lama	
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	160.000.000.000
2. KPRI Bhakti Praja	5.000.000.000
3. Pemerintah Kabupaten Demak	5.750.000.000
4. Pemerintah Kabupaten Grobogan	5.400.000.000
5. Pemerintah Kabupaten Temanggung	550.000.000
6. Bank Jateng	75.000.000.000
7. Kabupaten/Kota	250.000.000
Total Modal di setor	251.950.000.000
Total Ekuitas	251.950.000.000

2. Rencana Perubahan Modal

a. Uraian Mengenai Rencana Perubahan Modal

Tingkat kecukupan dan struktur permodalan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melakukan pengembangan usaha termasuk meningkatkan usaha produktif maupun perluasan jenis kegiatan usaha. Modal Dasar PT Jamkrida Jateng akan diubah menjadi sebesar Rp. 600.000.000.000,- dengan jumlah modal saat ini sebesar Rp 150.950.000.000,- dan di tahun 2022 akan terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp 100.000.000.000,- sehingga total modal disetor menjadi sebesar Rp 251.950.000.000,-.

b. Alasan / Pertimbangan

Lembaga penjamin wajib menjaga total *Gearing ratio* paling tinggi 40 (empat puluh) kali, sesuai dengan SE OJK No. 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin

c. Strategi

Memperluas Penjaminan pada sektor produktif
Meningkatkan kapasitas penjaminan retensi sendiri

❖ D. RENCANA PENGEMBANGAN ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN / ATAU TEKNOLOGI INFORMASI

a. Rencana Pengembangan Organisasi

a. Uraian Mengenai Rencana Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi PT Jamkrida Jateng fokus terhadap peningkatan kemampuan organisasi untuk dapat menyiapkan diri terhadap perubahan karena organisasi selalu menghadapi berbagai macam tantangan dan penyesuaian dengan lingkungan. Rencana pengembangan organisasi adalah mempertahankan ISO 9001, ISO 31000, dan menerapkan ISO 37001.

Struktur Organisasi

Berdasarkan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2018
- Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP-134/NB.1/2015 tentang Penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi Komisaris Utama PT Jamkrida Jateng atas nama Sujarwanto Dwiatmoko.
- Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP-809/NB.11/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Herman Budianto Selaku Calon Komisaris Independen PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah.

Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut

Komisaris Utama : Sujarwanto Dwiatmoko

Komisaris Independen : Herman Budianto

Berdasarkan :

- a. Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-132/NB.1/2015 tentang Penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi Direktur Utama PT Jamkrida Jateng atas nama M Nazir Siregar.
- b. Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-133/NB.1/2015 tentang Penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi Direktur PT Jamkrida Jateng atas nama Adi Nugroho.
- c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2019, susunan Direksi adalah sebagai berikut :

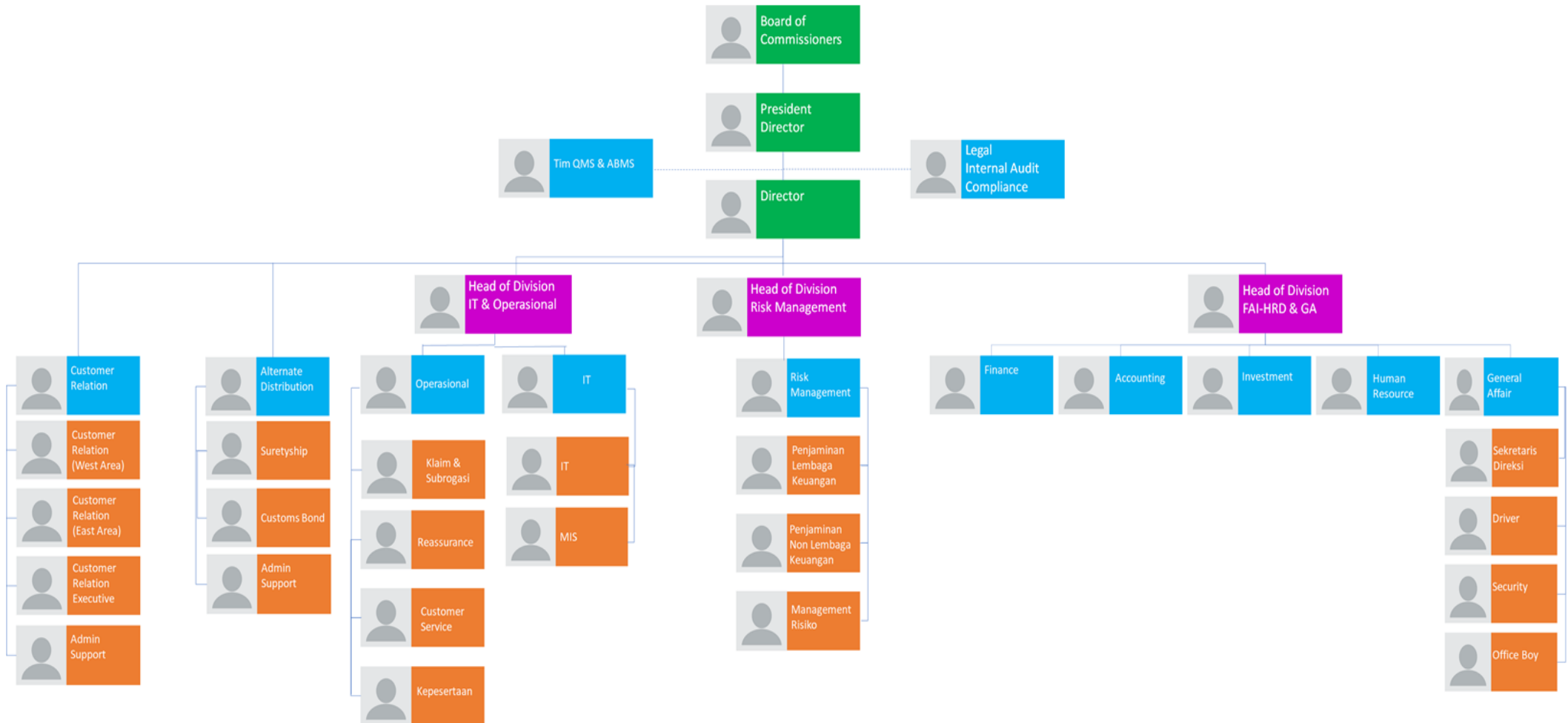
Direksi

Direktur Utama : M. Nazir Siregar

Direktur : Adi Nugroho

Struktur Organisasi

Untuk menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin ketat dalam industri penjaminan serta untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan diperlukan perubahan yang bersifat strategis guna mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan jangka panjang Perusahaan, berikut adalah struktur organisasi Perusahaan



- b. Alasan/Pertimbangan
Pengembangan organisasi dilakukan secara dinamis mengikuti kebutuhan dan rencana jangka menengah perusahaan yang mengedepankan nilai-nilai perusahaan dan GCG
 - c. Strategi
Strategi yang digunakan untuk rencana pengembangan organisasi adalah dengan mencari solusi atas masalah sedini mungkin, memenuhi kebutuhan organisasi, menyesuaikan metode pengembangan, meningkatkan kemampuan dan melibatkan peran serta individu, serta memberikan suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan
- b. Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia
- a. Uraian Mengenai Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia
Seiring dengan terus berkembangnya bisnis Perusahaan, sumber daya manusia sebagai roda perusahaan perlu dialokasikan serta agar dapat mencapai target perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia sangat penting agar dapat bekerja dengan optimal.
Salah satu cara yang dilakukan antara lain dengan cara rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penggunaan konsultan atau penasihat dan penggunaan tenaga kerja kontrak.
 - b. Alasan/Pertimbangan
Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, sumber daya yang berkualitas sangatlah diperlukan. Perencanaan sumber daya manusia memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan.
 - c. Strategi
Strategi yang dilakukan untuk pemenuhan rencana sumber daya manusia yaitu dengan memetakan kapasitas SDM yang dimiliki, memperkirakan kebutuhan SDM perusahaan sesuai dengan perkembangan bisnis untuk beberapa waktu kedepan, perkembangan talent dan tenaga kerja serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tenaga kerja yang ada

c. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Tabel Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Materi Diklat	Metode Diklat	Perkiraan Waktu Diklat	Durasi Diklat	Tempat	Narasumber / Lembaga Diklat	Jumlah seluruh Peserta	Biaya Diklat
1	Manajemen Risiko	Non In house training	Sept 2022	3 hari	Jakarta	BSMR	5 orang	Rp.21.250.000,-
2	Master Class Risk Management	Non In house training	Juli 2022	2 hari	Yogyakarta	CRMS	3 orang	Rp.48.000.000,-
3	Suretybond dan Bank Garansi	Non In house training	April 2022	2 hari	Surabaya	PT Ahli Asuransi Management Indonesia	5 orang	Rp.20.000.000,-
4	Legal, Litigation, and Reputational Risk Management	Non In house training	Agustus 2022	2 hari	Jakarta	IRMAPA	7 orang	Rp.30.000.000,-
5	Re-Asuransi	In house training	Mei 2022	1 hari	PT Jamkrida Jateng	PT Igna Asia	40 orang	Rp. 75.000.000,-
6	Quality Management System ISO 27001	In house training	Desember 2022	3 hari	PT Jamkrida Jateng	PT Alkindy	7 orang	Rp.200.000.000,-

b. Alasan / Pertimbangan

Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa setiap karyawan wajib mengikuti kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

c. Strategi

Perusahaan mewajibkan seluruh karyawan dengan level staff sampai dengan kepala Divisi untuk mengikuti program-program pelatihan pengembangan diri dengan durasi minimal 40 jam setiap tahun.

d. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

a. Tabel Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

No	Bidang Tugas	Alasan Pemanfaatan Tenaga Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya
1	Satpam	Pengendalian biaya Operasional	4	PT Bhuwana Eka Persada	1 tahun dengan evaluasi
2	<i>Office Boy</i>	Pengendalian biaya Operasional	2	Koperasi Mitra Pandhu Kencana	1 tahun dengan evaluasi
3	Penyimpanan dokumen yang disimpan di lokasi pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keamanan dokumen ▪ Efisiensi tempat penyimpanan 	-	IndoArsip	1 tahun dengan evaluasi
4	Penyediaan fasilitas dan layanan Pusat Data (Data Center) untuk Penanggulangan Bencana (<i>Disaster Recovery</i>)	Lokasi <i>Server</i> utama berbeda dengan <i>server backup</i>	-	PT. Media Sarana Data (GMEDIA)	1 tahun dengan evaluasi
5	Email <i>hosting</i> untuk Jamkrida Jateng ke pihak ketiga	Email tidak <i>hosting</i> di pihak ketiga, hanya berupa lisensi untuk manajemen konten pada <i>server</i> .	-	PT. Berkah Solusi Teknologi Informasi (Connectindo.com)	1 tahun dengan evaluasi

- b. Alasan/Pertimbangan
Alih daya memindahkan pekerjaan-pekerjaan untuk dikerjakan oleh pihak luar yang bukan menjadi *core business* perusahaan.
Pemanfaatan tenaga kerja alih daya ini bertujuan untuk mengefisienkan dan mengendalikan biaya Operasional serta memperoleh sumber daya manusia yang lebih profesional di bidangnya karena telah tersertifikasi.
 - c. Strategi
Pelaksanaan pekerjaan alih daya yang dilakukan adalah dengan penyediaan jasa pekerja pada PT Jamkrida Jateng dengan ketentuan pekerja tidak dirugikan dari segi undang-undang ketenagakerjaan serta memberikan hak dan kewajibannya kepada perusahaan alih daya.
- e. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi
- a. Uraian Rencana
Penyempurnaan fitur sistem yang lebih memudahkan operasional dan pembacaan data bisnis serta melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan sistem prioritas di Jamkrida Jateng.
 - b. Alasan/Pertimbangan
Diperlukan strategi tersebut untuk mempercepat pemenuhan sistem support di area operasional maupun bisnis PT Jamkrida Jateng, memastikan seluruh dokumentasi sistem dapat dilengkapi, dan melakukan evaluasi secara mendalam untuk penggunaan/kerangka/flow sistem yang sudah ada maupun yang akan dibuat.
 - c. Strategi
Penguatan tim internal eksisting dengan job desk yang terpisah, serta diadakan program project talent untuk staff professional di bidang development software untuk mengawal pengerjaan sistem baru (ReAS, HRIS, Internal Audit) yang direncanakan pada tahun 2022, mengatasi outstanding progress develop tahun 2021, dan mengadakan Kerjasama dengan pihak vendor dengan sistem beli putus untuk development sistem yang sudah direncanakan.

❖ E. PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN BESERTA ASUMSI YANG DIGUNAKAN

1. Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

No	Asumsi	Des 2022
	Asumsi Makro	
1	Pertumbuhan PDB	3.5%
2	Inflasi	4.7%
3	Lainnya, dirinci per jenis asumsi	
	Asumsi Mikro	
1	Pertumbuhan Penjaminan (%)	14%
2	Rasio klaim Penjaminan (%)	<70%
3	Tingkat Investasi	4.75%
4	Lainnya, dirinci per jenis asumsi	

2. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Penjaminan

a. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan

Pos-Pos	Des 2022
ASET	
Kas dan Setara Kas	32.943.222.246
Investasi	261.200.000.000
Aset Tetap	2.964.356.440
Aset Pajak Tangguhan	1.342.772.029
Aset Lainnya	264.890.558.581
Jumlah Aset	563.340.909.296
LIABILITAS	
Utang Klaim	1.403.626.539
Utang Pajak	4.932.725.102
Cadangan Klaim	10.759.197.916
Utang Penjaminan Ulang	13.735.528.181
Pendapatan ditangguhkan	235.376.658.437
Liabilitas lainnya	10.110.369.284
Jumlah Liabilitas	276.318.105.459
EKUITAS	
Modal	251.950.000.000
Cadangan Umum	15.542.563.666
Cadangan Tujuan	-
Saldo Laba	19.386.900.407
Laba Komprehensif	143.339.765
Jumlah Ekuitas	287.022.803.837
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	563.340.909.296

b. Proyeksi Laba / Rugi Komprehensif

Pos-Pos	Des 2022
PENDAPATAN PENJAMINAN	
Pendapatan IJP bersih Accrual Basis	48.632.376.436
Beban Klaim Nett	22.442.956.501
Pendapatan Investasi Bersih	11.599.205.573
Pendapatan lainnya bersih	9.195.000.000
Beban Usaha	22.750.000.000
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK	24.233.625.508
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	19.386.900.407

c. Proyeksi Laporan Arus Kas

Pos-Pos	Des 2022
Arus Kas dari Kegiatan Operasional	(7.679.158.655)
Arus Kas dari Kegiatan Investasi	10.099.205.573
Arus kas dari Aktivitas Pendanaan	(8.794.973.872)
Kenaikan/Penurunan Kas	(6.374.926.953)
Saldo Kas Awal	39.318.149.199
Saldo Kas Akhir	32.943.222.246

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	M. NAZIR SIREGAR	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
2.	ADI NUGROHO	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
3.	SUJARWANTO DWIATMOKO	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
4.	HERMAN BUDIANTO	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi. anggota Dewan Komisaris. dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain. anggota Dewan Komisaris lain. anggota DPS lain. dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi. anggota Dewan Komisaris. dan anggota DPS dimaksud menjabat

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain. anggota Dewan Komisaris. anggota DPS. dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	M. NAZIR SIREGAR	Direksi lainnya		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	
2.	ADI NUGROHO	Direksi lainnya		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi. anggota Dewan Komisaris lain. anggota DPS. dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	SUJARWANTO DWIATMOKO	Direksi		X		X	
		Dewan Komisaris lainnya		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	

2.	HERMAN BUDIANTO	Direksi		X		X	
		Dewan Komisaris lainnya		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Sampai dengan 31 Desember 2021 Perusahaan belum memiliki DPS						

J. Pengungkapan hal penting lainnya:

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Belum terdapat pengunduran diri maupun pemberhentian Auditor Eksternal
--

2. Transaksi material dengan pihak terkait

Sampai dengan 31 Desember 2021 Perusahaan tidak terdapat transaksi material dengan pihak terkait
--

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.	Sampai dengan 31 Desember 2021 Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan				

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

Sampai dengan 31 Desember 2021 Perusahaan tidak terdapat informasi material lainnya yang mempengaruhi kinerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

-

6. Sertifikasi

No	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1.	-	-	-
2.	-	-	-

7. Tenaga kerja asing

No.	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi. dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total penyimpangan		-	-
Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi. dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Telah diselesaikan	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-

9. Permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	X	X
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata	X	X
Total	X	X

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

ETIKA BISNIS PERUSAHAAN

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika dalam *Code of Conduct* ini adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dengan demikian etika bisnis bisa diartikan sebagai cara-cara baik untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, Perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun Perusahaan di masyarakat.

1. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan merupakan produk hukum yang wajib ditaati dan menjadi pedoman. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan standar dari perilaku yang harus dijalankan. Perusahaan senantiasa membina hubungan yang sehat dan harmonis dengan Regulator, Legislator dan instansi yang terkait lainnya baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Perusahaan juga menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Regulator/ Pemerintah.

Peraturan perundang-undangan yang diterapkan untuk perilaku bisnis Perusahaan ini mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Perusahaan, hukum bisnis, dan segala hukum serta peraturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan elemen utama yang harus dijaga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan. Ketentuan selanjutnya dapat mengacu pada peraturan Perusahaan yang berlaku.

2. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan Lainnya

Pemberian dan/atau penerimaan Hadiah, Cindera Mata maupun Jamuan Bisnis dilakukan dalam rangka interaksi sosial dan pembinaan hubungan yang baik antar Perusahaan dan Mitra Usaha secara sehat dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan tanpa menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha Perusahaan.

Perusahaan melarang tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Suap

Suap adalah suatu pemberian ataupun janji untuk memberi kepada seseorang atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya antara lain dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. untuk keuntungan si pemberi suap.

Bentuk-bentuk suap dapat berupa pemberian uang. barang. fasilitas. pemberian atau penerimaan jabatan kepada keluarga pejabat ataupun bentuk dan fasilitas lainnya yang dapat merupakan imbalan.

b. Pembayaran Tidak Wajar

Pembayaran tidak wajar adalah praktek-praktek pembayaran khusus. hiburan dan sokongan kepada pihak-pihak di luar Perusahaan yang melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku di dunia bisnis.

3. Kepedulian Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan dan memelihara perilaku yang dapat mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja Insan Perusahaan. Oleh karena itu bagi setiap Insan Perusahaan dalam bekerja harus:

- a. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan dan keselamatan kesehatan kerja.
- b. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.
- c. Menjaga tata tertib dan disiplin agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan teratur sehingga Perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik.
- d. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat.
- e. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan.
- f. Melakukan pemeriksaan. inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya. peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai kewenangannya untuk memastikan kesiapannya.

4. Pemberian Kesempatan Yang Sama Kepada Karyawan Untuk Mendapatkan Pekerjaan. Promosi dan Pemberhentian Kerja

- 1) Perusahaan menjunjung tinggi penegakkan hukum dan peraturan Perusahaan dengan konsisten tanpa membedakan ras. gender. agama dan jabatan.
- 2) Perusahaan selalu menjunjung kesetaraan kerja termasuk di dalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan setara serta perlakuan yang adil kepada seluruh Karyawan.

5. Standar Etika Dalam Berhubungan dengan *Stakeholders*

Kepercayaan merupakan unsur penting untuk meningkatkan loyalitas Nasabah maupun pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan. selain kepercayaan. peningkatan pelayanan yang tinggi menjadikan nilai tambah tersendiri bagi Perusahaan. Untuk menciptakan harmonisasi dan iklim usaha yang terpercaya tersebut. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya senantiasa bertindak professional. jujur. adil dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada *Stakeholders*.

Landasan Perusahaan dalam membina hubungan dengan *Stakeholders* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hubungan Dengan Insan Perusahaan

Dalam rangka mewujudkan hubungan yang berkualitas. adil serta dapat mendorong intensitas dan kualitas partisipasi Insan Perusahaan. Perusahaan akan memperlakukan Insan Perusahaan sebagai anggota Perusahaan dengan adil dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menghormati hak Insan Perusahaan serta akan selalu mengikutsertakan Insan Perusahaan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan Karyawan secara konsisten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Selalu mensosialisasikan semua peraturan. khususnya peraturan baru. kepada seluruh Insan Perusahaan;
- 3) Menciptakan kesempatan kerja yang sama kepada seluruh Insan Perusahaan tanpa membedakan suku. ras. gender. agama;
- 4) Menjunjung tinggi penegakkan hukum dan peraturan Perusahaan dengan konsisten tanpa membedakan suku. ras. gender. agama dan jabatan;
- 5) Senantiasa berusaha menciptakan tempat kerja yang berwawasan lingkungan serta menjaga kesehatan dan keselamatan Karyawannya;
- 6) Berusaha meningkatkan kesejahteraan Insan Perusahaan secara adil. layak dan transparan;
- 7) Memberikan penilaian. penghargaan dan pembayaran remunerasi sesuai kinerja dan kompetensi Karyawan. baik secara korporasi. tim kerja maupun individu;
- 8) Menghargai kreativitas. inovasi dan inisiatif Karyawan yang memberikan nilai tambah terhadap Perusahaan.

b. Hubungan Dengan Pemerintah

Perusahaan mempunyai komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik yang komunikatif dengan Pemerintah. dalam hal ini dengan setiap Jajaran Pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan;

Hal-hal yang perlu diperhatikan Perusahaan dalam menjaga hubungan dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) Senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Membina hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif dengan Regulator, Legislator dan instansi terkait lainnya baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- 3) Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah/Regulator.
- 4) Mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas usaha Perusahaan termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah ketenagakerjaan dan lingkungan hidup;
- 5) Mendukung program nasional maupun regional khususnya di bidang teknologi, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya;
- 6) Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis;
- 7) Senantiasa berkomunikasi dan menjaga hubungan yang harmonis dan beretika berdasarkan nilai kejujuran, saling menghormati, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan antara lain dengan memberikan jamuan dan hadiah untuk kepentingan pribadi.

c. Hubungan Dengan Pemegang Saham

- 1) Senantiasa berusaha meningkatkan nilai Perusahaan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kemampulabaan Perusahaan;
- 2) Senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan lain yang berlaku dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar;
- 3) Senantiasa menjamin bahwa informasi material mengenai Perusahaan selalu diberikan dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan teratur kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Tidak melakukan suatu perbuatan untuk mencari keuntungan bagi pribadi dan pihak lain dengan menggunakan informasi Perusahaan yang bukan untuk kepentingan umum atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Setiap Pemegang Saham dan wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perusahaan, yang berkaitan dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perusahaan.

- 2) Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada setiap Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap pemegang Saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Setiap Pemegang Saham harus memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Hubungan Dengan Nasabah

- 1) Senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada Nasabah;
- 2) Senantiasa meningkatkan pelayanan dengan menggunakan teknologi baru yang sesuai. dengan memperhatikan azas manfaat dan tepat guna bagi peningkatan pelayanan serta kenyamanan kerja dan peningkatan daya saing;
- 3) Melaksanakan promosi yang berkesinambungan secara sehat. *fair*. jujur. mudah dipahami serta diterima oleh norma-norma masyarakat.

e. Hubungan Dengan Mitra Usaha

Perusahaan dalam berhubungan dengan calon Mitra Usaha dan Mitra Kerja dilakukan secara professional. setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Senantiasa mengedepankan azas manfaat dengan memilih mitra usaha yang memberikan sinergi terbaik pada Perusahaan dan bebas KKN;
- 2) Menghindari kerjasama dengan Mitra Usaha yang melakukan praktek usaha yang tidak etis;
- 3) Selalu menjaga hubungan baik. setara. transparan dan saling menguntungkan dalam bekerjasama dengan para Mitra Usaha;
- 4) Senantiasa melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum;
- 5) Senantiasa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kontrak;
- 6) Mitra usaha wajib mematuhi semua ketentuan internal yang berlaku di Perusahaan.

f. Hubungan Dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

- 1) Selalu membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat Perusahaan beroperasi;
- 2) Senantiasa menjaga lingkungan hidup dengan meminimalkan dampak lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem yang ada serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;
- 3) Menghindari segala perkataan, tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan golongan.

6. Standar Etika Jajaran Manajemen dan Karyawan

Kelangsungan hidup suatu Perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja dan citra Perusahaan. Kinerja dan citra Perusahaan itu sendiri sangat ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu kemampuan (kapabilitas dan kompetensi) dan perilaku setiap Insan Perusahaan sebagai penggerak roda organisasi.

a. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan

- 1) Menghargai dan memperlakukan bawahan sebagai manusia seutuhnya dengan memperhatikan semua sisi kemanusiaannya;
- 2) Selalu berkomunikasi secara santun, terbuka, jujur dan bertanggungjawab;
- 3) Senantiasa meningkatkan pengetahuan bawahan dan menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif bawahan;
- 4) Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan serta menghargai dan menerima perbedaan pendapat dan kritik yang membangun;
- 5) Memberi keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari, sesuai kata dengan perbuatan;
- 6) Menjadi pelopor pembaharuan dan manajemen perubahan;
- 7) Mendorong budaya kepatuhan terhadap pedoman perilaku dan kebijakan Perusahaan;
- 8) Mendorong/memotivasi bawahan untuk berprestasi dan secara bersama-sama mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
- 9) Melakukan koreksi atau teguran ke bawahan secara konstruktif, adil dan tanpa mematahkan semangat kerja yang bersangkutan;
- 10) Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan karirnya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, gender dan golongan;
- 11) Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparansi sesuai peraturan Perusahaan;
- 12) Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh Insan Perusahaan dengan menghindari persaingan yang tidak sehat serta menghindari pengkotakan antar bagian;
- 13) Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan terhadap bawahannya.

b. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan

- 1) Bekerja jujur dan professional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- 2) Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama Insan Perusahaan;
- 3) Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
- 4) Memberikan saran dan masukan yang positif kepada atasan;
- 5) Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara santun dalam mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perusahaan dan menyampaikan saran untuk perbaikan;
- 6) Tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja Perusahaan;
- 7) Mematuhi peraturan Perusahaan dan menginformasikan kepada atasan bila terdapat indikasi penyimpangan;
- 8) Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (*policy*), dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan;
- 9) Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya;
- 10) Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).


c. Perilaku Sebagai Rekan Kerja

- 1) Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik dalam maupun di luar pekerjaan;
- 2) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok demi kemajuan Perusahaan;
- 3) Memiliki semangat kerja sama yang tinggi dan selalu siap membantu rekan ataupun unit kerja lain untuk kebaikan Perusahaan;
- 4) Bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi;
- 5) Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan membedakan satu dengan lainnya;
- 6) Menerima setiap masukan dan saran yang diberikan untuk perbaikan diri dan peningkatan kinerja;
- 7) Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar unit kerja untuk mendukung kerja sama dan koordinasi yang baik demi kemajuan Perusahaan dengan tidak melanggar Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dan Karyawan yaitu menyimpan rahasia Perusahaan dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- 8) Bersikap terbuka, simpatik dan membantu sesama rekan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan baik;
- 9) Memiliki semangat persaingan yang sehat untuk memacu prestasi kerja secara maksimal;
- 10) Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur intimidasi, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan teman, serta saling menjatuhkan terhadap sesama rekan kerja;
- 11) Bekerja dengan harmonis berdasarkan dedikasi dan kepercayaan bersama untuk mencapai tujuan bersama.


7. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.
- b. Berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan.
- c. Insan Perusahaan yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh Perusahaan. atau Insan Perusahaan yang memiliki hak atas hasil karya tersebut. harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah Insan Perusahaan tidak bekerja lagi untuk Perusahaan.
- d. Seluruh Insan Perusahaan harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun di luar jam kerja. jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan.

* Menyetujui,
Semarang, 8 April 2022


Direktur Utama
M. Nazir Siregar

 **Jamkrida Jateng**


Direktur
Adi Nugroho